

Judul : Panitia Angket Diminta Segera Akhiri Masa Kerja
Tanggal : Jumat, 22 Desember 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Panitia Angket Diminta Segera Akhiri Masa Kerja

Golkar segera menarik dukungan dari Panitia Angket.

Danang Firmanto

danang.firmanto@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar Panitia Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengakhiri masa kerjanya. Keinginan itu bermunculan dari beberapa fraksi anggota Panitia Angket setelah Partai Golkar menyatakan bakal menarik diri dari keanggotaan Panitia Angket KPK. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan Panitia Angket



Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar yang juga Ketua Panitia Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 31 Agustus lalu.

sekarang sudah tak lagi menggelar rapat dengar pendapat.

Arsul mengatakan sebagian anggota Panitia Angket memang menghendaki kinerja Panitia Angket berakhir setelah ada putusan Mahkamah

Konstitusi (MK). MK hingga kini belum memutuskan uji materi Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tentang kewenangan Dewan melakukan hak angket terhadap KPK yang

sempat diajukan koalisi sipil. Namun ia menilai Panitia Angket tak perlu memperpanjang masa tugas lagi.

"Kalau sudah selesai, ya sudah, bahwa pimpinan KPK tidak datang kan kita bisa menggunakan forum

yang lain," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Rabu lalu, Partai Golkar menyatakan akan mencabut dukungan terhadap Panitia Angket KPK. Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zurkarnain, mengatakan semangat partainya saat ini untuk melindungi KPK. Sikap Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga itu berbeda jauh dengan sikap politik Golkar saat dipimpin Setya Novanto, yang ketika itu Golkar menjadi salah satu motor pembentukan Panitia Angket.

Panitia Angket KPK dibentuk pada 30 Mei lalu melalui rapat paripurna Dewan. Ada enam fraksi di DPR yang menyatakan mendukung dibentuknya Panitia Angket, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, NasDem, Hanura, PAN, dan PPP.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate, tak mau menanggapi rencana Partai Golkar keluar dari Panitia Angket. Namun ia juga mendesak Panitia Angket segera menyelesaikan tugas. "Kami minta segeralah laporannya

apa, tolong diberikan dan diselesaikan," kata dia.

Adapun anggota Panitia Angket dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menilai rencana Golkar untuk mencabut dukungan dari Panitia Angket tidak akan mengganggu apa yang telah dan bakal dikerjakan Panitia Angket. Toh, kata dia, Panitia Angket tinggal menyelesaikan kesimpulan untuk disampaikan pada masa sidang awal tahun depan. "Kalau menyampaikan keluar (dari keanggotaan Panitia Angket) itu tinggal pertimbangan politik saja," katanya.

Adapun politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, menyatakan rencana keluar dari Panitia Angket sudah menjadi salah satu agenda utama partainya di bawah kepemimpinan Airlangga. "Setelah masuk reses, tanggal 9 Januari, itu pertama menarik Golkar dari situ (keanggotaan Panitia Angket)," ujarnya. Partai Golkar, kata dia, bakal melakukan revitalisasi untuk menaikkan elektabilitas menjelang pilkada 2018 dan Pemilu 2019.